



## Pemerintah Atasi Banjir Code dengan Rusunawa

YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta terus mematangkan rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan pemerintah pusat sebagai salah satu cara menyelesaikan ancaman banjir lahar dingin Merapi, yang berpotensi merendam permukiman warga di bantaran Sungai Code. "Sedang kami negosiasikan," kata Wali Kota Herry Zudianto kemarin.

Dalam tiap kali negosiasi, kata Herry, pemerintah pusat selalu mempertanyakan ketersediaan lahan. Soal tanah dianggap sebagai masalah pokok realisasi rencana itu. Di tengah pertumbuhan penduduk dan permukiman, mencari tanah di Kota Yogyakarta bukan perkara mudah. "Carilah tanah

yang luas tidak gampang," ujarnya.

Menurut dia, pada dasarnya warga yang tinggal di bantaran sungai menyalahi hukum alam. Pemerintah kota tidak pernah berupaya memaksa mereka pindah dari bantaran sungai. Jika mereka tetap bertahan tinggal, "Biar hukum alam yang memaksa," kata Herry.

Saat ini Pemerintah Kota Yogyakarta hanya memiliki lahan 600 meter persegi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Eko Suryo Maharsono mengatakan tempat itu bisa dijadikan lokasi rumah susun sederhana. Namun dia enggan menyebutkan lokasinya. "Itu nantilah," ucapnya.

Sabtu pekan lalu, ribuan warga di pinggir Kali Code di Yogyakarta ter-

paksa mengungsi sementara. Kemarin sore, banjir kembali terjadi, perkampungan di bantaran Sungai Code, seperti Ledok Tukangan, Kecamatan Danurejan, kembali terendam pasir dan lumpur.

Wali Kota berharap warga memiliki kesadaran bahwa tempat yang mereka tinggali tak aman. Apalagi bila tiba-tiba datang banjir lahar dingin. Tapi, "Kalau masih merasa *save*, ya tidak apa," katanya. Jadi, dia melanjutkan, permintaan untuk pindah dari tempat itu, "Jangan diartikan dari pemerintah, tapi alam," Herry menandakan.

Sementara itu, untuk mengatasi serbuan lahar dingin di Jawa Tengah, Kepala Pelaksana Harian Ba-

dan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Priyantono Jarot Nugroho mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten sedang membangun 306 rumah hunian sementara: empat lokasi di Desa Sirahan dan dua lokasi di Desa Jumoyo. "Sedang dimulai proses pembangunannya," katanya kepada *Tempo* di Semarang.

Untuk itu, pemerintah mengalokasikan dana Rp 8,5 juta per rumah. Nantinya setiap dua rumah akan dibuat menjadi satu blok, berdempetan. Satu blok dianggarkan Rp 17 juta. Dengan dinding bambu, rumah itu terdiri atas dua kamar, dilengkapi sarana mandi-cuci-kakus.

● ANANG ZAKARIA | ROFIUDIN

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kantor Penanggulangan Kebakara			

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005